



**SALINAN**

**BUPATI BARITO SELATAN  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN**

**NOMOR 8 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2016**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BARITO SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa memenuhi ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Barito Selatan tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);

**Jln. Pelita Nomor 305 F BUNTOK Kode Pos 73711  
KALIMANTAN TENGAH  
Telepon (0525) 21001, Fax (0525) 21500**

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028)
14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia 5340);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4616);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Bdan Pemeriksa Keuangan;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2008 Nomor 18);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2);

36. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3);
37. Peraturan Bupati Kabupaten Barito Selatan Nomor 20 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis AkruaI Kabupaten Barito Selatan;
38. Peraturan Bupati Kabupaten Barito Selatan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Penerapan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Barito Selatan Berbasis AkruaI;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.**

**Pasal 1**

Laporan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2016, terdiri atas:

1. Pendapatan			
a. Pendapatan Asli Daerah.....	Rp44.019.869.814,06		
b. Dana Perimbangan..	Rp785.114.703.446,00		
c. Lain-lain Pendapatan yang Sah.....	Rp102.898.196.801,41	dan	
Jumlah Pendapatan.....			Rp932.032.770.061,47
2. Belanja			
a. Belanja Tidak Langsung			
(1) Belanja Pegawai..	Rp359.973.665.731,00		
(2) Belanja Bunga....	Rp7.587.647,00		
(3) Belanja Hibah.....	Rp45.086.359.390,00		
(4) Belanja Bantuan Sosial.....	Rp4.450.296.000,00		
(5) Belanja Bagi Hasil.....	Rp781.000.000,00		
(6) Belanja Bantuan Keuangan.....	Rp104.179.109.953,00	dan	
Belanja Tidak Langsung.....			Rp514.478.018.721,00
b. Belanja Langsung			
(1) Belanja Pegawai..	Rp46.054.571.412,00		
(2) Belanja Barang dan Jasa.....	Rp215.583.458.955,70	dan	
(3) Belanja Modal.....	Rp163.482.408.343,36		
Belanja Langsung.....			Rp425.120.438.711,06
Jumlah Belanja.....			Rp939.598.457.432,06
(Defisit).....			<u>(Rp7.565.687.370,59)</u>

3. Pembiayaan		
a. Penerimaan.....	Rp98.427.571.278,96	dan
b. Pengeluaran.....	Rp5.873.783.634,00	
Jumlah Pembayaran Neto.....		<u>Rp92.553.787.644,96</u>
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan.....		Rp84.988.100.274,37

**Pasal 2**

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Pasal 3**

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran.

**Pasal 4**

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Pasal 5**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok  
Pada tanggal, 10 Agustus 2017

**BUPATI BARITO SELATAN**

ttd

**EDDY RAYA SAMSURI**

Diundangkan di Buntok  
Pada tanggal, 10 Agustus 2017

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BARITO SELATAN**

ttd

**EDI KRISTIANTO**



**BATANG TUBUH**  
**PERATURAN BUPATI KABUPATEN BARITO SELATAN**  
**NOMOR 8 TAHUN 2017**  
**TENTANG**  
**PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN**  
**PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016**

**LAMPIRAN I**

**PERATURAN BUPATI KABUPATEN BARITO SELATAN**

**NOMOR 8 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN**

**PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016**

**“RINGKASAN LAPORAN REALISASI”**

**LAMPIRAN I**

**PERATURAN BUPATI KABUPATEN BARITO SELATAN**

**NOMOR 8 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN**

**PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016**

**01. DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**LAMPIRAN I**

**PERATURAN BUPATI KABUPATEN BARITO SELATAN**

**NOMOR 8 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN**

**PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016**

## **02. DINAS KESEHATAN**

**LAMPIRAN I**

**PERATURAN BUPATI KABUPATEN BARITO SELATAN**

**NOMOR 8 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN**

**PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016**

**03. RSUD**

**LAMPIRAN I**

**PERATURAN BUPATI KABUPATEN BARITO SELATAN**

**NOMOR 8 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN**

**PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016**

**04. DINAS PU**

**LAMPIRAN I**

**PERATURAN BUPATI KABUPATEN BARITO SELATAN**

**NOMOR 8 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN**

**PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016**

**05. DINAS PERUMAHAN DAN PEMAKAMAN**

**LAMPIRAN I**

**PERATURAN BUPATI KABUPATEN BARITO SELATAN**

**NOMOR 8 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN**

**PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016**

## **06. BAPPEDA**

**LAMPIRAN I**

**PERATURAN BUPATI KABUPATEN BARITO SELATAN**

**NOMOR 8 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN**

**PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016**

**07. DISHUBKOMINFO**

**LAMPIRAN I**

**PERATURAN BUPATI KABUPATEN BARITO SELATAN**

**NOMOR 8 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN**

**PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016**

**08. BLH**

**LAMPIRAN I**

**PERATURAN BUPATI KABUPATEN BARITO SELATAN**

**NOMOR 8 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN**

**PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016**

**09. DISDUKCATPIL**

**LAMPIRAN I**

**PERATURAN BUPATI KABUPATEN BARITO SELATAN**

**NOMOR 8 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN**

**PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016**

**10. B P3AKB**

**LAMPIRAN I**

**PERATURAN BUPATI KABUPATEN BARITO SELATAN**

**NOMOR 8 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN**

**PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016**

**11. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

**LAMPIRAN I**

**PERATURAN BUPATI KABUPATEN BARITO SELATAN**

**NOMOR 8 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN**

**PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016**

**12. DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN  
TRANSMIGRASI**

**LAMPIRAN I**

**PERATURAN BUPATI KABUPATEN BARITO SELATAN**

**NOMOR 8 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN**

**PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016**

**13. DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,  
KOPERASI DAN UMKM**

**LAMPIRAN I**

**PERATURAN BUPATI KABUPATEN BARITO SELATAN**

**NOMOR 8 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN**

**PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016**

## **14. DISPORAWISATA**

**LAMPIRAN I**

**PERATURAN BUPATI KABUPATEN BARITO SELATAN**

**NOMOR 8 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN**

**PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016**

## **15. BADAN KESBANGPOL**

**LAMPIRAN I**

**PERATURAN BUPATI KABUPATEN BARITO SELATAN**

**NOMOR 8 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN**

**PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016**

## **16. SATPOL PP**

**LAMPIRAN I**

**PERATURAN BUPATI KABUPATEN BARITO SELATAN**

**NOMOR 8 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN**

**PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016**

**17. DPRD**

**LAMPIRAN I**

**PERATURAN BUPATI KABUPATEN BARITO SELATAN**

**NOMOR 8 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN**

**PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016**

**18. KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH**

**LAMPIRAN I**

**PERATURAN BUPATI KABUPATEN BARITO SELATAN**

**NOMOR 8 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN**

**PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016**

## **19. SEKRETARIAT DAERAH**

**LAMPIRAN I**

**PERATURAN BUPATI KABUPATEN BARITO SELATAN**

**NOMOR 8 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN**

**PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016**

**20. P P K D**

**LAMPIRAN I**

**PERATURAN BUPATI KABUPATEN BARITO SELATAN**

**NOMOR 8 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN**

**PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016**

**21. SEKRETARIAT DEWAN**

**LAMPIRAN I**

**PERATURAN BUPATI KABUPATEN BARITO SELATAN**

**NOMOR 8 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN**

**PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016**

## **22. DINAS PENDAPATAN**

**LAMPIRAN I**

**PERATURAN BUPATI KABUPATEN BARITO SELATAN**

**NOMOR 8 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN**

**PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016**

## **23. INSPEKTORAT**

**LAMPIRAN I**

**PERATURAN BUPATI KABUPATEN BARITO SELATAN**

**NOMOR 8 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN**

**PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016**

**24. B K P P**

**LAMPIRAN I**

**PERATURAN BUPATI KABUPATEN BARITO SELATAN**

**NOMOR 8 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN**

**PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016**

**25. BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU DAN  
PENANAMAN MODAL**

**LAMPIRAN I**

**PERATURAN BUPATI KABUPATEN BARITO SELATAN**

**NOMOR 8 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN**

**PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016**

## **26. KECAMATAN DUSUN SELATAN**

**LAMPIRAN I**

**PERATURAN BUPATI KABUPATEN BARITO SELATAN**

**NOMOR 8 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN**

**PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016**

## **27. KECAMATAN DUSUN HILIR**

**LAMPIRAN I**

**PERATURAN BUPATI KABUPATEN BARITO SELATAN**

**NOMOR 8 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN**

**PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016**

**28. KECAMATAN DUSUN UTARA**

**LAMPIRAN I**

**PERATURAN BUPATI KABUPATEN BARITO SELATAN**

**NOMOR 8 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN**

**PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016**

**29. KECAMATAN GUNUNG BINTANG AWAI**

**LAMPIRAN I**

**PERATURAN BUPATI KABUPATEN BARITO SELATAN**

**NOMOR 8 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN**

**PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016**

**30. KECAMATAN KARAU KUALA**

**LAMPIRAN I**

**PERATURAN BUPATI KABUPATEN BARITO SELATAN**

**NOMOR 8 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN**

**PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016**

## **31. KECAMATAN JENAMAS**

**LAMPIRAN I**

**PERATURAN BUPATI KABUPATEN BARITO SELATAN**

**NOMOR 8 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN**

**PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016**

**32. SEKRETARIAT KORPRI**

**LAMPIRAN I**

**PERATURAN BUPATI KABUPATEN BARITO SELATAN**

**NOMOR 8 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN**

**PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016**

**33. BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA  
PENYULUHAN**

**LAMPIRAN I**

**PERATURAN BUPATI KABUPATEN BARITO SELATAN**

**NOMOR 8 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN**

**PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016**

**34. BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN  
PEMERINTAHAN DESA**

**LAMPIRAN I**

**PERATURAN BUPATI KABUPATEN BARITO SELATAN**

**NOMOR 8 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN**

**PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016**

**35. KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH**

**LAMPIRAN I**

**PERATURAN BUPATI KABUPATEN BARITO SELATAN**

**NOMOR 8 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN**

**PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016**

**36. DINAS PERTANIAN**

**LAMPIRAN I**

**PERATURAN BUPATI KABUPATEN BARITO SELATAN**

**NOMOR 8 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN**

**PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016**

**37. DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN**

**LAMPIRAN I**

**PERATURAN BUPATI KABUPATEN BARITO SELATAN**

**NOMOR 8 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN**

**PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016**

**38. DINAS PERTAMBANGAN, ENERGI DAN SUMBER**

**DAYA MINERAL**

**LAMPIRAN I**

**PERATURAN BUPATI KABUPATEN BARITO SELATAN**

**NOMOR 8 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN**

**PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016**

## **39. DINAS PERIKANAN**

**LAMPIRAN II**

**PERATURAN BUPATI KABUPATEN BARITO SELATAN**

**NOMOR 8 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN**

**PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016**

## **1. DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**LAMPIRAN II**

**PERATURAN BUPATI KABUPATEN BARITO SELATAN**

**NOMOR 8 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN**

**PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016**

## **02. DINAS KESEHATAN**

**LAMPIRAN II**

**PERATURAN BUPATI KABUPATEN BARITO SELATAN**

**NOMOR 8 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN**

**PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016**

**03. RSUD**

**LAMPIRAN II**

**PERATURAN BUPATI KABUPATEN BARITO SELATAN**

**NOMOR 8 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN**

**PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016**

**04. DINAS PU**

**LAMPIRAN II**

**PERATURAN BUPATI KABUPATEN BARITO SELATAN**

**NOMOR 8 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN**

**PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016**

**05. DINAS PERUMAHAN DAN PEMAKAMAN**

**LAMPIRAN II**

**PERATURAN BUPATI KABUPATEN BARITO SELATAN**

**NOMOR 8 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN**

**PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016**

**06. BAPPEDA**

**LAMPIRAN II**

**PERATURAN BUPATI KABUPATEN BARITO SELATAN**

**NOMOR 8 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN**

**PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016**

**07. DISHUBKOMINFO**

**LAMPIRAN II**

**PERATURAN BUPATI KABUPATEN BARITO SELATAN**

**NOMOR 8 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN**

**PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016**

**08. BLH**

**LAMPIRAN II**

**PERATURAN BUPATI KABUPATEN BARITO SELATAN**

**NOMOR 8 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN**

**PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016**

**09. DISDUKCATPIL**

**LAMPIRAN II**

**PERATURAN BUPATI KABUPATEN BARITO SELATAN**

**NOMOR 8 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN**

**PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016**

**10. B P3AKB**

**LAMPIRAN II**

**PERATURAN BUPATI KABUPATEN BARITO SELATAN**

**NOMOR 8 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN**

**PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016**

**11. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

**LAMPIRAN II**

**PERATURAN BUPATI KABUPATEN BARITO SELATAN**

**NOMOR 8 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN**

**PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016**

**12. DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN  
TRANSMIGRASI**

**LAMPIRAN II**

**PERATURAN BUPATI KABUPATEN BARITO SELATAN**

**NOMOR 8 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN**

**PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016**

**13. DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,  
KOPERASI DAN UMKM**

**LAMPIRAN II**

**PERATURAN BUPATI KABUPATEN BARITO SELATAN**

**NOMOR 8 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN**

**PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016**

## **14. DISPORAWISATA**

**LAMPIRAN II**

**PERATURAN BUPATI KABUPATEN BARITO SELATAN**

**NOMOR 8 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN**

**PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016**

## **15. BADAN KESBANGPOL**

**LAMPIRAN II**

**PERATURAN BUPATI KABUPATEN BARITO SELATAN**

**NOMOR 8 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN**

**PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016**

## **16. SATPOL PP**

**LAMPIRAN II**  
**PERATURAN BUPATI KABUPATEN BARITO SELATAN**  
**NOMOR 8 TAHUN 2017**  
**TENTANG**  
**PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN**  
**PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016**

**17. DPRD**

**LAMPIRAN II**

**PERATURAN BUPATI KABUPATEN BARITO SELATAN**

**NOMOR 8 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN**

**PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016**

**18. KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH**

**LAMPIRAN II**

**PERATURAN BUPATI KABUPATEN BARITO SELATAN**

**NOMOR 8 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN**

**PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016**

## **19. SEKRETARIAT DAERAH**

**LAMPIRAN II**

**PERATURAN BUPATI KABUPATEN BARITO SELATAN**

**NOMOR 8 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN**

**PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016**

**20. P P K D**

**LAMPIRAN II**

**PERATURAN BUPATI KABUPATEN BARITO SELATAN**

**NOMOR 8 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN**

**PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016**

## **21. SEKRETARIAT DEWAN**

**LAMPIRAN II**

**PERATURAN BUPATI KABUPATEN BARITO SELATAN**

**NOMOR 8 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN**

**PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016**

## **22. DINAS PENDAPATAN**

**LAMPIRAN II**

**PERATURAN BUPATI KABUPATEN BARITO SELATAN**

**NOMOR 8 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN**

**PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016**

## **23. INSPEKTORAT**

**LAMPIRAN II**

**PERATURAN BUPATI KABUPATEN BARITO SELATAN**

**NOMOR 8 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN**

**PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016**

**24. B K P P**

**LAMPIRAN II**

**PERATURAN BUPATI KABUPATEN BARITO SELATAN**

**NOMOR 8 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN**

**PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016**

**25. BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU DAN  
PENANAMAN MODAL**

**LAMPIRAN II**

**PERATURAN BUPATI KABUPATEN BARITO SELATAN**

**NOMOR 8 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN**

**PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016**

**26. KECAMATAN DUSUN SELATAN**

**LAMPIRAN II**

**PERATURAN BUPATI KABUPATEN BARITO SELATAN**

**NOMOR 8 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN**

**PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016**

**27. KECAMATAN DUSUN HILIR**

**LAMPIRAN II**

**PERATURAN BUPATI KABUPATEN BARITO SELATAN**

**NOMOR 8 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN**

**PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016**

## **28. KECAMATAN DUSUN UTARA**

**LAMPIRAN II**

**PERATURAN BUPATI KABUPATEN BARITO SELATAN**

**NOMOR 8 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN**

**PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016**

**29. KECAMATAN GUNUNG BINTANG AWAI**

**LAMPIRAN II**

**PERATURAN BUPATI KABUPATEN BARITO SELATAN**

**NOMOR 8 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN**

**PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016**

**30. KECAMATAN KARAU KUALA**

**LAMPIRAN II**

**PERATURAN BUPATI KABUPATEN BARITO SELATAN**

**NOMOR 8 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN**

**PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016**

## **31. KECAMATAN JENAMAS**

**LAMPIRAN II**

**PERATURAN BUPATI KABUPATEN BARITO SELATAN**

**NOMOR 8 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN**

**PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016**

## **32. SEKRETARIAT KORPRI**

**LAMPIRAN II**

**PERATURAN BUPATI KABUPATEN BARITO SELATAN**

**NOMOR 8 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN**

**PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016**

**33. BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA  
PENYULUHAN**

**LAMPIRAN II**

**PERATURAN BUPATI KABUPATEN BARITO SELATAN**

**NOMOR 8 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN**

**PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016**

**34. BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN  
PEMERINTAHAN DESA**

**LAMPIRAN II**

**PERATURAN BUPATI KABUPATEN BARITO SELATAN**

**NOMOR 8 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN**

**PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016**

**35. KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH**

**LAMPIRAN II**

**PERATURAN BUPATI KABUPATEN BARITO SELATAN**

**NOMOR 8 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN**

**PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016**

## **36. DINAS PERTANIAN**

**LAMPIRAN II**

**PERATURAN BUPATI KABUPATEN BARITO SELATAN**

**NOMOR 8 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN**

**PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016**

**37. DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN**

**LAMPIRAN II**

**PERATURAN BUPATI KABUPATEN BARITO SELATAN**

**NOMOR 8 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN**

**PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016**

**38. DINAS PERTAMBANGAN, ENERGI DAN SUMBER**

**DAYA MINERAL**

**LAMPIRAN II**

**PERATURAN BUPATI KABUPATEN BARITO SELATAN**

**NOMOR 8 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN**

**PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016**

## **39. DINAS PERIKANAN**